

# PILKADES, KEPALA DESA DAN PEREBUTAN CELUK

Oleh Agus Nurhadi<sup>1</sup>

## Abstrak

Kepala desa masih menjadi magnet yang menarik elit strategis di tingkat desa. Mereka rela berinvestasi mahal pada waktu pilkades, dan menunaikan tugas sosial dengan biaya tinggi, padahal penghasilan dari bengkok dan insentif bulanan jelas tidak bisa menutup biaya yang telah dikeluarkan. Berdasarkan pembacaan pilkades di Kalipanjang ditemukan bahwa para elit itu berebut menjadi kepala desa bukanlah mempertahankan ideologi, nilai perjuangan yang bernilai ibadah sebagaimana dalam ajaran agama, atau ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dengan meminjam analisis Pierre Bourdieu, mereka berebut untuk mendapatkan *cultural capital* yang berupa celuk.

Kata-kata kunci : pilkades, perebutan, cultural capital, ekonomi, politik

## Abstract

Head of Village is still a magnet that attracts the elite at the village. They are willing to invest expensively in the election and perform social task with high cost whereas the bengkok income and monthly incentive could not cover the incurred cost. Based on the results of the election in Kalipajang, it was found that the elites who scrambled as head of village was not to maintain the ideology, and to struggle that has a value of worship as in religion or in economics as propounded by Karl Marx, but they fought to get celuk-a culture capital which is Borrowed Picere Bourdieu's analysis.

Keywords: Head of Village, fight, culture capital, economics, politics

---

<sup>1</sup> Agus Nurhadi adalah dosen Sosiologi, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tinggal di Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang 80181, e-mail: agusnurhadi2010@gmail.com

## A. PENGANTAR

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) merupakan salah satu kegiatan menarik di masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat menyebutnya dengan 'pesta demokrasi'.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang mendaftar sebagai calon dalam pilkades - minimal ada 3 calon. Di samping itu, partisipasi dalam pilkades masih sangat tinggi. Mereka berangkat ramai-ramai dari rumah calon menuju tempat pemungutan suara. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan situasi pemilukada atau pemilu lainnya.

Padahal bengkok kepala desa Kalipanjang<sup>3</sup> itu hanya 5 bahu karena terbatasnya lahan yang dimiliki desa. Hasil panen dari bengkok selama menjabat itu tidak cukup menutup biaya pilkades. Biaya itu digunakan untuk penggalangan massa, *open house* selama 1,5 bulan, koordinasi, makan dan rokok dan sebagainya. Di samping itu, kepala desa, selama menjabat, harus menunaikan tugas sosial yang tidak sedikit, seperti memberi sumbangan, memenuhi undangan lainnya. Kepala desa biasanya harus memenuhi janji sosial untuk memberikan sebagian bengkok untuk kepentingan sosial selama menjabat. Sehingga secara logika, kepala desa tidak akan mendapatkan bagian apa-apa.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan mengapa calon kepala desa rela saling berebut menduduki jabatan kepala desa dengan investasi mahal? Untuk menjawabnya, penulis akan mendiskripsikan pemilihan kepala desa yang berlangsung di Kalipanjang, jejak tugas kepala desa, khususnya tugas sosial, selanjutnya menggambarkan ekonomi politik yang diperoleh dari jabatan kepala desa.

## B. PEMILIHAN KEPALA DESA

Pilkades, mengikuti teori sosial Pierre Bourdieu, merupakan *field* (arena).<sup>4</sup> Dunia ini isinya arena, termasuk sekolah, kepanitiaan, pasar, dan

---

<sup>2</sup> Baca gambaran lengkap dari pilkades tersebut dalam Sartono Kartodirjo, 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Aditya Media.

<sup>3</sup> Bukan nama desa sebenarnya untuk kepentingan akademik

<sup>4</sup> Loic Wacquant, 'Towards a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu', *Sociological Theory*, vol. 7, 1989, hal. 33-41

sebagainya karena di dalam arena tersimpan beragam modal. Oleh karena itu, jauh hari sebelum masa jabatan kepala desa selesai, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun, tokoh masyarakat, atau para elit dalam teori Suzanne Keller disebut *strategic elites*,<sup>5</sup> sering berkumpul – ngrumpi politik – untuk membicarakan tentang siapa yang akan dijadikan calon kepala desa yang akan datang. Hal ini tentu mempertimbangkan kapasitas keilmuan, kecerdasan sosial, leadership maupun ekonomi. Dari sekian pertimbangan tersebut, faktor ekonomi biasanya paling menentukan karena mudah diukur, sedangkan faktor lainnya sangat subyektif.

Calon yang berminat bertemu dengan elit strategis, dan berakhir dengan kesepakatan (*deal*) untuk mendukung calon. Seseorang yang pada awalnya kutang berminat mencalonkan diri, setelah mendapatkan dukungan dari para elit tersebut akhirnya bersemangat mencalonkan diri sebagai calon. Oleh karena itu, sering terjadi, pemimpin itu hasil rekayasa dari para elit. Kondisi ini berbeda dengan pada masa sebelum reformasi di mana inisiatif berasal dari calon sendiri. Calon berasal dari dinasti orang kaya, berpengaruh, memiliki relasi kuasa dengan berbagai pihak, dan sebagainya. Calon itu harus orang kuat, dan bagi yang merasa tidak kuat, mereka tahu diri dan tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Setelah jadwal pilkades sudah mulai dekat, kurang lebih 2 – 3 bulan, tiap calon membentuk tim sukses pemenangan (*gapi*). Tim sukses ini memiliki struktur, mulai dari ketua, ketua wilayah, bendahara, humas dan sebagainya. Tim ini sangat penting, karena sukses tidaknya calon sangat tergantung pada tim ini. Tim ini biasanya mendapatkan insentif di depan, agar bekerja dengan semangat. Tidak ada spirit perjuangan untuk memperbaiki desa, dan jargon indah lainnya. Semua harus dibayar dengan uang. Maka tidak salah kalau ada istilah maju tak gentar membela yang membayar. Untuk ukuran desa Kalipanjang, insentif ketua pemenangan itu saat ini sekitar 10 juta, sedangkan tim lain harganya lebih rendah, sesuai dengan bobot tanggung jawab dan ketokohnya. Hal ini menunjukkan terjadinya komodifikasi yang luar biasa dan pilkades – melunturnya spirit perjuangan dalam memilih pemimpin digantikan dengan spirit mencari

---

<sup>5</sup> Suzanne Keller, *Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society*, New York: Random House, 1963. hal. 54

keuntungan. Hal ini menjadi salah satu faktor dari tinggi ongkos politik. Seorang calon tidak cukup menyiapkan modal untuk makan-makan (pesta rakyat), tetapi calon harus menyiapkan uang untuk membeli suara rakyat. Inilah gejala komodifikasi yang terjadi sejak pasca reformasi. Semua diukur dengan uang. Bahkan semakin hari semakin liar gejala komodifikasi tersebut. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkades sebagai strategi pemenangan.<sup>6</sup>

Sejak dibentuk tim pemenangan tersebut, setiap hari diselenggarakan pertemuan secara informal di rumah para calon untuk mengatur strategi. Berbagai cara dan sarana digunakan untuk mengajak agar mau memilih calon yang telah ditentukan – mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak masuk tim pemenangan, mendatangi pengajian, mendatangi pengajian ibu-ibu, pertemuan kelompok tani, bergaul dengan anak muda, mengajak wong cilik, sering muncul dalam kegiatan masyarakat dan sebagainya. Tindakan calon tersebut tidak seperti biasanya, dan hanya dilakukan menjelang pilkades. Hampir semua calon melakukan seperti ini. Bambang Hidayana mengkategorikan tindakan para elit merebut simpati tersebut merupakan gembuk kepada rakyat. Hal ini terjadi karena kredibilitas calon kepala desa yang rendah.<sup>7</sup> Namun sayangnya hal itu tidak disikapi secara kritis oleh masyarakat. Para calon melakukan politik pencitraan dengan menampilkan tanda sebagai orang yang baik, dan layak dipilih.

Di samping itu, calon biasanya juga menggunakan strategi yaitu fanatisme wilayah – dukuh Tugu itu memilih calon A, dukuh Wadasmalang itu mendukung calon B dan sebagainya. Fanatisme wilayah menjadi instrument dari para elit. Pilkades sebenarnya tidak memberi pelajaran kepada warga tentang kebebasan berpolitik (*political rights*) sebagai bagian dari hak asasi manusia karena hak politik mereka dipasung oleh para tokohnya. Mereka tidak bebas menentukan pilihannya, karena takut

---

<sup>6</sup> Baca penelitian Nico L. Kana, Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa, dalam *Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora* Tahun 11 no. 2, 2001, hal. 20.

<sup>7</sup> Bambang Hidayana, 'Gembuk: Strategi Politik dalam Rekrutmen Elit Penguasa di Desa Pulungansari, Yogyakarta, dalam *Humaniora*. FIB UGM, Vol 23, No. 1 Tahun 2001, hal. 5

dengan tokoh yang ada di sekitarnya rumah mereka. Inilah yang terjadi di pedukuhan yang sebagian besar warganya sangat patuh dengan para tokohnya, seperti di dukuh Tugu dan Wadasmalang. Wong cilik hanya dianggap client dari patron yang dimainkan oleh para elit. Dalam bahasa James C. Scott, wong cilik dengan elit memiliki hubungan patronase.<sup>8</sup>

Pilkades pada tahun 1946 dimenangkan oleh Pak Dukram, anak dari Mbah Dalijan. Tidak ada catatan jumlah suara pada waktu tersebut. Masyarakat hanya ingat bahwa calon terdiri dari Pak Maqsudi dan Pak Dukram. Pemenangnya adalah Pak Dukram sendiri yang pernah menjabat sebagai carik (sekdes) di era Pak Maqsudi, namun kemudian dipecat oleh Pak Maqsudi digantikan anak menantu yang bernama Pak Wirja. Maka pilkades tahun 1946 tersebut merupakan persaingan antara atasan dan bawahan, persaingan antara yang memecat (mendholimi) dengan yang dipecat (didholimi), persaingan orang kaya Pak Maqsudi dengan orang kaya Pak Dukram. Persaingan dalam pilades ini lebih menampakkan sebagai persaingan antar borjuis desa, untuk memperebutkan kekuasaannya. Mereka bukan hanya berkompetisi dalam mengumpulkan harta, tetapi juga dalam memperebutkan kekuasaan melalui pilkades. Persaingan antar borjuis seperti ini sudah berlangsung lama. Kajian pilkades selama satu abad di daerah Pati, Jawa Tengah, akhirnya Husken berkesimpulan *'kebo gedhe menung berike'*.<sup>9</sup>

Pada waktu dulu, calon kepala desa itu harus orang kaya, orang yang memiliki ketokohan, memiliki kesaktian, orang kuat baik secara fisik maupun mental karena harus berhadapan dengan berbagai pihak. Kemenangan Pak Dukram sangat rasional karena beliau didukung oleh jumlah keluarga yang banyak. Di samping itu, legitimasi dari Pak Maqsudi untuk kepala desa sedang turun karena rakyat masih ingat penggulingan Pak Maqsudi dari jabatannya sebagai kepala desa karena dicurigai lebih berpihak kepada penjajah Jepang yang menyengsarakan rakyat yang dikenal dengan peristiwa daerah. Sebagian besar rumah dan seluruh harta Pak Maqsudi dibakar oleh masa. Hal ini menimpa 90 % kepala desa di daerah

---

<sup>8</sup> James C. Scott, "Patron-Client Politic and Political Change in Southeast Asia" *American Political Science Review* 66: (1) 1972, hal. 92

<sup>9</sup> Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Differensiasi Sosial*, Jakarta: Grasindo, 1988, hal. 1

Pemalang pada tahun 1946 yang dikenal dengan peristiwa dombreng.<sup>10</sup>

Setelah Pak Dukram usianya sudah tua, kemudian diselenggarakan pilkades pada tahun 1967 yang dimenangkan oleh Pak Wahyu. Persaingan terjadi antara calon Pak Wahyu dengan Pak Wirja. Pak Wahyu merupakan putra dari Pak Dukram, cucu dari Mbah Dahyan, posisi sebagai carik, didukung PNI-Golkar. Sedangkan Pak Wirja, mantan carik, putra kepala desa Pak Maqsudi, didukung dari kalangan PPP. Keduanya sama-sama keturunan dari kepala desa, memiliki modal besar, baik uang, dukungan, keturunan, dan ideologi. Yang menarik adalah pilkades ini masih kelanjutan dari persaingan borjuis desa (putra Pak Dukram berhadapan dengan putra Pak Maqsudi). Variasi baru pilkades ini adalah instrumentalisasi politik untuk kekuasaan - Pak Wahyu menggunakan kendaraan Golkar, sedangkan Pak Dukram menggunakan kendaraan PPP. Yang berkonflik bukan partai politik, tetapi calonlah yang berkonflik dengan menggunakan kendaraan partai politik. Pilkades pada waktu itu sangat tampak sebagai reproduksi konflik akibat dari pemilu 1955.

Selama Pak Wahyu menjabat, situasi politik di desa Kalipanjang diwarnai oleh konflik yang luar biasa. Pak Wahyu tidak senang dengan aktifitas politik yang dilakukan oleh para tokoh agama, karena para tokoh agama yang berbasis di masjid sering menggunakan sarana ibadah untuk kepentingan balas dendam. Misalnya, pengajian untuk mengkritik, dan menjelek-jelekkan kepala desa. Pada saat yang sama, Pak Wahyu juga melakukan tindakan yang represif kepada ulama dan tokoh agama lainnya dengan cara menghukum seperti tidak memberikan surat berkelakuan baik, memanggil ke balai desa dan sebagainya. Akhirnya, Pak Wahyu digulingkan oleh rakyatnya dengan menggunakan tangan DPRRI dengan tuduhan korupsi. Lawan politik Pak Wahyu di Kalipanjang menggunakan relasi kuasa (*power relation*) di fraksi PPP DPRRI untuk menjatuhkan Pak Wahyu karena beliau telah melakukan tindakan yang represif kepada warga PPP di desa Kalipanjang.

Pilkades setelah Pak Wahyu lengser itu sangat rame. Ada dua calon terkuat, yaitu Pak Muhlis dan Pak Sahir. Pak Muhlis mendapatkan suara 905, sedangkan Sahir mendapatkan suara 855. Selisih hanya 50 suara. Prediksi

---

<sup>10</sup> Anton E. Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2004, hal. 20

pada waktu itu menang Pak Sahir dari kalangan NU, tetapi karena kelihaihan Pak Wahyu, tentunya dengan kompensasi, maka akhirnya dimenangkan oleh Pak Muhlis. Tidak ada dukungan yang gratis. Pak Muhlis itu anggota CPM, didukung oleh Golkar, sedangkan Pak Sahir didukung oleh tokoh agama.

Pak Muhlis memperoleh dukungan dari keluarga Mbah Daliyan dibawah kendali Pak Wahyu, kades yang digulingkan. Sedangkan dari kalangan santri, mayoritas suaranya ke Pak Sahir, kakak kandung dari Pak Tayubi, dan ke Pak Ihsan, pjs selama 2 tahun. Persaingan antara Pak Muhlis dengan Pak Sakhir sangat sengit, karena selisih hanya 50 suara. Dukungan dari Pak Wahyu kepada Pak Muhlis hanya 1 malam. Prediksi menang ini ke Pak Sakhir, tetapi akhirnya kalah. Inilah strategi yang digunakan oleh Pak Wahyu – mau mendukung kepada kepala desa yang bisa mengamankannya. Pak Wahyu melakukan barter politik dengan Pak Muhlis, dalam bahasa sekarang dikenal dengan politik dagang sapi.

Tabel 1. Perolehan Suara Pilkades

No	Nama	Jumlah Suara	Keterangan
1	Muhlis	905	Kaum nasionalis, mantan kepala desa yang digulingkan
2	Sakhir	855	Kaumsantri, ulama yang menggulingkan
3	Ihsan	125	Kurang dukungan karena tidak berasal dari Kalipanjang

Sumber: catatan Pak Harir, mantan kepala desa

Sejak inilah muncul gejala pemimpin itu dibuat, dijadikan bonika oleh yang membuat. Pak Muhlis bukanlah siapa-siapa, tetapi dijadikan oleh Pak Wahyu untuk mengamankan asset ekonomi politiknya. Pak Wahyu, meskipun sudah lengser tetap mengendalikan pemerintahani. Kebijakan yang ditempuh oleh Pak Muhlis sesuai saran dari Pak Wahyu. Konflik masih berkelanjutan selama kepemimpinan Pak Muhlis, maka Pak Muhlis tidak laku dijual kembali dalam pilkades berikutnya. Pak Muhlis akhirnya juga tidak mendapatkan apa-apa, karena sebagian tanahnya digunakan untuk membalas budi Pak Wahyu.

Setelah Pak Muhlis selesai, pilkades diselenggarakan pada tahun 1993. Dalam pilkades tersebut, Pak Harir bersaing ketat dengan Pak Fahruri. Pak Harir memperoleh suara 1100 suara, sedangkan Pak Fahruri memperoleh 900 suara. Calon lain Pak Muhlis memperoleh suara 363. Pilkades dimenangkan oleh Pak Harir yang didukung oleh kalangan keluarga Mbah Daliyan, dan Golkar mengalahkan saingan Pak Fahruri yang didukung oleh banyak kyai, dan kader PPP. Persaingan ini juga reproduksi sosial antara partai politik yang dominan.<sup>11</sup>

Tabel 2. Perolehan Suara Pilkades 1993

No	Nama	Jumlah Suara	Keterangan
1	Harir	1125	Kaum nasionalis
2	Fahruri	937	Kaum santri, ulama
3	Muhlis	363	Dukuh Wadasmalang

Sumber: catatan Pak Harir, mantan kepala desa

Pak Harir merupakan cucu dari keluarga Mbah Daliyan, keturunan kepala desa. Sedangkan Pak Fahruri juga cucu dari kepala desa Pak Maqsudi. Pada pemilu 1993 inilah, calon kepala desa mulai melirik suara dari perantau khususnya di Jakarta. Suara dari perantau mulai dianggap penting dalam pilkades. Perantau bukan hanya memiliki peran ekonomi, tetapi juga politik. Peran ini sangat berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Juliette Konning yang menyatakan bahwa perantau itu agen dari perubahan ekonomi dan budaya keluarga.<sup>12</sup> Dalam pilkades 1993 ini, kepala desa langsung menjemput dengan bis, dan langsung menuju ke rumah calon kepala desa. Jumlah bis yang datang dari Jakarta ini sering dibaca para pengamat lokal sebagai refleksi kekuatan calon. Bis yang membawa pemilih yang menuju ke rumah Pak Harir sebanyak 2 buah, dan yang ke rumah Pak Fahruri juga 2 buah. Semua itu membutuhkan heaya yang tidak sedikit.

Setelah Pak Harir selesai, pada tahun 2002 diselenggarakan pilkades. Pak Fahruri, mengalahkan calon 4 calon lainnya yaitu Slamet Riyanto, Bu

<sup>11</sup> Mengikuti logika teori *reproduction of dominant class* dari Pierre Bourdieu.

<sup>12</sup> Juliette Konning, *Generation of Change: Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village during the New Order*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hal. 376



Witri, Sutarno dan Muhdi. Pak Fahruri memperoleh suara 923, sedangkan Bu Witri 525 suara, Slamet Riyanto 588, Sutarno 553, dan Pak Muhdi 348 suara. Basis suara Pak Fahruri berasal dari sebagian penduduk dari krajan dan mayoritas penduduk Tugu. Sedangkan suara Pak Slamet berasal dari sebagian krajan. Suara dari krajan pecah ke Bu Witri, sedangkan suara Pak Sutarno berasal dari mayoritas penduduk dukuh Wadasmalang, suara Pak Muhdi berasal dari sebagian penduduk krajan.

Tabel 3. Perolehan Suara Pilkades 2002

No	Nama	Jumlah Suara	Keterangan
1	Fahruri	923	Sebagian kecil krajan, dan mayoritas Tugu
2	Slamet Riyanto	588	Sebagian krajan Kalipanjang
3	Witri	525	Sebagian krajan Kalipanjang
4	Sutarno	553	Sebagian krajan Kalipanjang
5	Muhdi	348	Sebagian dukuh Wadasmalang

Sumber: catatan Pak Fahruri, mantan kepala desa

Pak Slamet kalah dalam pilkades tersebut karena suara dari kalangan keluarga Mbah Daliyan dan nasionalis pecah – ada yang ke calon Bu Witri dan Pak Slamet. Calon dari Golkar kurang solid. Kedua calon tersebut (Bu Witri dan Pak Slamet) tidak bisa disatikan. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk menjadi kepala desa itu tinggi karena ada ekonomi dan politiknya. Mereka sudah menjadi PNS guru di SD Kalipanjang. Jika suara yang diperoleh Bu Witri dan Pak Slamet Riyanto tersebut dikumpulkan akan mampu menggungguli suara yang diperoleh Pak Fahruri. Kemenangan Pak Fahruri pada waktu itu diklaim merupakan kemenangan PPP di Kalipanjang, dan diakui sebagai sejarah kebangkitan Islam di Kalipanjang. Padahal suara mereka tetap dibawah suara yang nasionalis.

Pendukung Pak Fahruri tidak puas dengan kepemimpinannya. Bahkan Pak Fahruri berani mengusik kebiasaan do'a fidyah yang memiliki implikasi ekonomi bagi ulama. Hal ini dikonstruksi oleh tokoh agama sebagai pelecehan ulama. Maka pada tahun 2005, masyarakat beramai-ramai menggulingkan Pak Fahruri, dan beliau tidak bisa mengelaknya. Biaya pilkades tentu belum bisa ditutup dari penghasilan bengkok yang

baru dipegang selama 2,5 tahun. Pak Fahruri dilengserkan di tengah jalan dan praktis belum menikmati hasil dari jabatan kepala desa.

Pada tanggal 13 Desember 2006 diselenggarakan pilkades, yang diramaikan oleh tiga calon yaitu Slamet Riyanto, Abdurrahman dan Suhono. Slamet Riyanto dan Suhono berasal dari krajan, sedangkan Abdurrahman berasal dari dukuh Tugu. Pilkades dimenangkan oleh Slamet Riyanto dengan 1276 suara, Pak Abdurrahman memperoleh suara 930 dan Pak Suhono memperoleh suara 878. Jumlah pemilih 4181, tetapi yang menggunakan hak pemilih hanya 3084. Ada 1097 pemilih yang tidak menggunakan haknya - merantau di luar kota, tidak terjangkau oleh tim sukses calon kepala desa, atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

Tabel 4. Perolehan Suara Pilkades 2006

No	Nama	Jumlah Suara	Keterangan
1	Slamet Riyanto	1276	Krajan Kalipanjang, didukung oleh sebagian krajan dan Wadasmalang
2	Abdurrohman	930	Dukuh Tugu, penduduk dari Tugu yg solid
3	Suhono	878	Krajan Kalipanjang, didukung ulama dan sebagian penduduk krajan, dan wadas malang

Sumber: Panitia Pilkades dan observasi

Pak Slamet Riyanto merupakan kader Golkar, didukung oleh keluarga Mbah Daliyan, basis wilayah di krajan Kalipanjang Selatan dan sebagian pedukuhan Wadasmalang. Bagi Pak Slamet Riyanto, pilkades 2006 tersebut merupakan pencalonan ke dua, setelah yang pertama dikalahkan oleh Pak Fahruri. Pak Slamet sangat penasaran kenapa kalah dengan Pak Fahruri, maka beliau tahun 2006 tersebut mencoba kembali, dan akhirnya menang dalam pilkades. Beliau sudah menjadi PNS guru, demikian juga Pak Suhono. Unikny, keduanya bekerja sebagai guru di sekolah yang sama (bersaing di sekolah, dan di masyarakat).

Sedangkan mayoritas pendukung Abdurrahman berasal dari Tugu. Meskipun berasal dari pedukuhan, suara yang diperoleh Pak Abdurrohman sangat signifikan. Calon kepala desa Suhono berasal didukung oleh

sebagian penduduk krajan dan sebagian pedukuhan Wadasmalang, didukung oleh kalangan ulama, dan tokoh PPP. Pak Slamet Riyanto sejak awal sangat berhati-hati dengan biaya pilkades. Sejak awal beliau tidak mau berjanji untuk memberikan bengkoknya kepada orang lain, karena beliau menyadari bahwa tugas sosial kepala desa itu sangat berat.

Pilkades tahun 2006 ini menjadi ajang pertarungan antara elit agama dengan elit nasionalis. Suara masyarakat krajan Kalipanjang dan Wadasmalang diperebutkan oleh calon dari Slamet Riyanto dan Suhono. Suhono didukung oleh kyai dan ulama, sedangkan Slamet Riyanto didukung oleh keluarga Pak Wahyu. Slamet Riyanto menjadi elit baru karena orang tuannya pamong yang digulingkan oleh Fahruri. Orang PPP yang di dalamnya banyak ulama, lebih banyak mendukung Suhono, sedangkan Slamet Riyanto didukung oleh elit dari Golkar, dan elit lainnya yang tidak senang dengan elit agama.

Pak Suhono sendiri sebenarnya kurang berminat menjadi kepala desa, tetapi karena para tokoh sering datang dan membujuknya dan sanggup menjadi pendukungnya, khususnya dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat, akhirnya luluh juga. Seperti pada umumnya, pilkades selalu menjadi arena pertarungan bukan hanya antar calon tetapi juga antar pendukung.

Dalam pilkades tahun 2006 ini, Slamet Riyanto menghabiskan dana sebesar Rp. 85 juta rupiah, sedangkan Abdurrohman mengeluarkan dana Rp. 250 juta, dan Suhono menghabiskan dana sebesar Rp. 130 juta. Slamet Riyanti sangat hati-hati dalam mengeluarkan uang. Beliau lebih mengandalkan kepercayaan orang bukan pembelian suara. Beliau juga tidak membeli suara dari kalangan tokoh karena harganya mahal. Padahal dalam pemilu, harga tokoh itu sama dengan harga wong cilik.

Setelah masa jabatan Pak Slamet Riyanto selesai, pada tahun 2012 diselenggarakan pilkades. Calon Abdurrohman pada awalnya kurang berminat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa karena tidak punya uang. Hartanya sudah habis untuk pilkades sebelumnya yang kalah dengan Slamet Riyanto. Tetapi setelah Abdurrohman ditemui oleh para tokoh, dan para tokoh itu mendukungnya, maka Abdurrohman menjadi bersemangat. Para tokoh pada waktu meyakinkan dengan hal. Pertama, di

desa Kalipanjang, setelah Orde Baru, tidak akan ada dua periode jabatan sebagai kepala desa. Kedua, calon yang menang itu calon yang tampil 2 kali persaingan dalam pilkades. Kedua hal tersebut akhirnya dijadikan dasar oleh Abdurrahman untuk maju lagi dalam pilkades tanggal 16 Desember 2012 yang lalu. Ternyata kedua hal yang disampaikan oleh para tokoh tersebut hanyalah *mithos* – tidak terbukti. Masyarakat semakin lebih rasional, dan mengurangi pada *mithos* yang berkembang di masyarakat.

Tabel 5. Perolehan Suara Pilkades 2012

No Urut	Nama	Jumlah Suara	Keterangan
1	Slamet Riyanto	1536	Krajan Kalipanjang Selatan, dan Wadasmalang, dan wong cilik lainnya
2.	Abdurrohman	1465	Dukuh Tugu, krajan Kalipanjang, dan didukung oleh seluruh ulama dan tokoh masyarakat
3	Endang	139	Sebagian kecil dari dukuh Tugu

Sumber: Panitia Pilkades tahun 2012 dan observasi

Data di atas menunjukkan terjadi persaingan ketat antara Slamet Riyanto dengan Abdurrohman. Slamet Riyanto memiliki basis di wilayah Kalipanjang Selatan, dan Wadasmalang, dan wong cilik. Sedangkan Abdurrohman memiliki basis wilayah di dukuh Tugu, dan krajan Kalipanjang Tengah. Tetapi yang menarik dari pilkades tahun 2012 ini adalah Abdurrohman yang didukung oleh mayoritas tokoh masyarakat dan ulama yang disimbolkan dengan 'kakap'. Tokoh yang dimaksud antara lain, Harit, Sutrisno, Ali, Tayubi, kyai Muslih, Rosyidiq, Asmu'i Sahnan, Muhsin. Tokoh tersebut bukanlah tokoh gratis, tetapi sudah bertarif mulai dari 2 – 10 juta rupiah untuk event pilkades. Tetapi calon yang didukung oleh para tokoh tersebut dikalahkan oleh Slamet Riyanto yang didukung oleh wong cilik yang disimbolkan oleh 'juthung'.

Abdurrohman berusaha keras agar bisa memenangkan pilkades karena menjadi taruhan bagi dirinya dan pendukungnya. Semua prediksi dari 'orang pintar' berpihak kepada Abdurrohman. Beliau telah mengeluarkan

uang yang tidak sedikit agar bisa menjabat sebagai kepala desa. Menurut beberapa sumber yang terpercaya, orang dekat Abdurrohman yang tidak mau disebut namanya, Abdurrohman telah menghabiskan dana sebesar Rp. 480 juta rupiah untuk biaya pilkades. Beliau harus menjual hampir semua tanah warisannya untuk menutup biaya tersebut. Tiap warga yang mendukungnya mendapatkan Rp. 50.000,-. Maka, setelah dinyatakan kalah, beliau langsung pergi meninggalkan desanya untuk keperantauan. Sementara pemenang pilkades, Slamet Riyanto, menghabiskan dana sebesar 180 juta rupiah.

Menurut Lipset (1959) yang dikenal dengan penganut *modernization theory* mengajukan tesis bahwa '*prosperity as a pre-requisite for democracy*'. Tidak mungkin menerapkan demokrasi jika rakyatnya masih harus banyak berfikir tentang perut, sandang, dan rumah. Pandangan ini dalam banyak hal sangat realistik. Di negara dalam kategori negara 'demokrasi' seperti Amerika, Kanada, dan negara Eropa itu sudah mapan secara ekonomi. Rakyat tidak lagi berfikir tentang bagaimana perut.

Namun demikian, pandangan Lipset tersebut segera dibantah karena banyak negara yang memiliki penduduk miskin, tetapi lebih demokratis dan tidak sedikit negara yang memiliki ekonomi maju, tetapi cenderung otoriter. India merupakan negara yang selama ini banyak penduduk miskin, tetapi mempraktekkan demokrasi. Singapura yang dikenal negara makmur tetapi kurang demokratis. Oleh karena itu pada tahun 1994 kemudian memperbaiki tesisnya dengan *economic prosperity as encouraging factor for democracy*.<sup>15</sup>

Dari riwayat pilkades di Kalipanjang di atas menunjukkan bahwa pilkades bukan hanya peristiwa sehari dengan kegiatan pencoblosan saja, tetapi membutuhkan energi, baik materiil maupun non materiil yang banyak. Pilkadesa itu investasi politik yang mahal. Calon harus mengumpulkan *gaji* (seperti tim sukses), meminta dukungan dan analisis dari paranormal, mendatangi tokoh agama dan masyarakat untuk meminta dukungan, memberi makan, minum dan rokok selama 1,5 bulan lebih, mengumpulkan orang, kampanye formal menjelang pencoblosan, pengambilan gambar, pencoblosan dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> Lihat Seymour Lipset, 1994. "The Social Requisites of Democracy Revisited" dalam *American Sociological Review*, 59 (1): 1-22

Semua kegiatan di atas membutuhkan biaya. Kalau hal itu dianggap sebagai investasi, maka investasi dalam pilkades itu sangat mahal yang hasilnya tidak pasti. Itulah investasi di dunia politik. Biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap peristiwa politik seperti pilkades masih sangat tinggi, dan hal ini sangat membebani kepada calon kepala desa. Tidak sedikit calon kepala desa yang kalah kemudian menjadi sakit, karena hartanya habis, tidak berani pulang dan sebagainya. Bagi yang menang, hal ini pada akhirnya bisa mendorong untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya dengan cara yang melanggar hukum. Maka terjadilah korupsi yang merajalela seperti sekarang ini. Sistem harus dirubah agar para calon tidak mengeluarkan biaya besar. Ongkos politik pilkades harus ditekan dengan sistem yang efisien.

### C. TUGAS KEPALA DESA

Menjadi kepala desa pada saat ini sangat berat. Kepala desa sebenarnya juga memiliki tugas yang tidak ringan. Tugas kepala desa wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang selama 24 jam, tidak seperti kantor lainnya yang dibatasi jam pelayanan. Kepala desa tidak bisa menunda pelayanan kepada masyarakat karena kepala desa tinggal bersama masyarakat.

Secara umum, ada tiga tugas pokok kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.<sup>14</sup> *Pertama*, tugas administrasi (pemerintahan). Kepala desa bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, mulai dari surat keterangan kelahiran hingga kematian, usaha, kelakuan baik, kependudukan, tanah dan sebagainya. Semua kebutuhan administrasi warga harus bisa dilayani oleh kepala desa. Jika jumlah warga dalam sebuah desa itu 5.000 penduduk, maka kepala desa harus melayani 5.000 penduduk tersebut tanpa pilih kasih karena kepala desa merupakan pemimpin semua orang, bukan golongan atau kelompok tertentu.

Pada masa Orde Baru, kepala desa sering menyalahgunakan kekuasaan sebagai pelayan administrasi ini untuk kepentingan.<sup>15</sup> Kepala

---

<sup>14</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>15</sup> Hans Antlov, *Negara dalam Desa: Patronasi Kepemimpinan Lokal*, Yogyakarta: Lappera, 2002 hal 279.

desa seharusnya menjadi pelayan seluruh warga, bukan pelayan kepada pendukungnya saja. Kepala desa Pak Wahyu sangat jelas memberikan pelayanan yang diskriminatif antara pendukungnya dengan mereka yang tidak mendukung pada waktu pilkades. Tugas administrasi yang dibutuhkan masyarakat justru menjadi alat politik bagi kepala desa untuk melakukan pembalasan kepada warga yang tidak mendukungnya. Pada saat yang sama, tugas administrasi juga menjadi alat politik untuk membalas budi kepada pendukungnya, sebagaimana layaknya politik makan buah nangka – siapa yang kena pulut, akan menuai nangka.

Tugas administrasi ini juga sekaligus menjadi sumber ekonomi politik bagi kepala desa. Setiap kepala desa mengeluarkan surat, maka ada konsekuensi keuangan. Semakin mendesak dan urgen, maka semakin tinggi ongkos yang harus dikeluarkan oleh warganya. Surat keterangan untuk melamar menjadi pegawai negeri atau pekerjaan kantoran akan lebih mahal dibandingkan dengan melamar di pabrik. Tidak ada ketetapan ongkos yang pasti, ukuran pembayaran. Hal ini terjadi karena kepala desa ingin menunjukkan kekuasaannya kepada masyarakat luas. Kekuasaan itu sangat penting bagi kepala desa. Kekuasaan inilah yang sampai sekarang masih diperoleh dari kepala desa.

*Kedua*, tugas pembangunan. Kepala desa harus menjadi inisiator pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Proyek di tingkat pedesaan menjadi tanggung jawab kepala desa. Di samping itu, kepala desa juga mempunyai tugas mengumpulkan pajak. Namun demikian, tugas inilah yang sering menjadi sumber korupsi di tingkat desa. Kepala desa telah mendapatkan fee dalam pengumpulan pajak rakyat, tetapi sering pajak tersebut digunakan oleh kepala desa. Di samping itu, tugas melaksanakan pembangunan mestinya untuk rakyat, akhirnya justru menjadi sumber ekonomi bagi kepala desa. Sebelum ada BPD (Badan Perwakilan Desa), masyarakat tidak ada yang mengetahui berapa besarnya uang pembangunan masuk ke desa, dan berapa pajak yang harus disetor ke negara karena tidak ada pengawas di level desa. Kebutuhan yang tidak terduga yang harus ditanggung oleh kepala desa itu tidak sedikit – melayani tamu, rapat mendadak, dan sebagainya. Semua ini membutuhkan dana, dan tidak bisa dianggarkan. Oleh karena itu tidak sedikit kepala desa yang menggunakan uang pembangunan untuk kegiatan mendadak tersebut. Pada awalnya pinjam, tetapi lama kelamaan menjadi lupa untuk mengembalikan. Maka

kepala desa akhirnya banyak yang terjerat penyalahgunaan keuangan.

*Ketiga*, tugas sosial. Tugas inilah merupakan tugas yang paling berat yang harus dilaksanakan oleh kepala desa, meskipun tidak tertulis.<sup>16</sup> Kepala desa harus menghadiri hajatan yang dilaksanakan oleh warga. Kepala desa juga harus hadir pada waktu ada warganya yang meninggal. Kepala desa juga harus menghadiri acara yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Jika kepala desa jarang hadir, maka kepala desa akan dicap sebagai kepala desa yang tidak peduli dengan warganya. Pelaksanaan tugas sosial menjadi ukuran utama penilaian kepada kepala desa. Sehingga tugas sosial menjadi faktor determinan bagi kepala desa.

Kepala desa Pak Slamet Riyanto menyatakan bahwa tugas terberat bagi kepala desa Kalipanjang adalah tugas sosial. Tugas ini tidak mengenal batasan waktu—berlangsung selama 24 jam. Kepala desa harus siap melayani masyarakat. Menurut Pak Slamet Riyanto, tugas sosial ini jumlahnya sangat banyak. Misalnya, menghadiri setiap ada acara kematian, menghadiri setiap ada acara hajatan yang dilaksanakan oleh warga, melayani warga yang melapor atau mengadu, merukunkan warga jika ada warga yang konflik, memberi bantuan jika ada warga yang membutuhkan bantuan dana, menolong warga jika ada warga yang membutuhkan pertolongan (mengantar ke rumah sakit, dan sebagainya, melayani tamu dari kantor yang lebih tinggi seperti kecamatan, polsek, koramil, dinas kabupaten dan sebagainya. Tugas sosial ini sangat dikeluhkan oleh hampir semua istri kepala desa. Tugas sosial tidak ada anggaran dari pemerintah tugas sosial tersebut, padahal jumlah uang yang harus dikeluarkan tidak sedikit, dan berlangsung terus menerus.

Ada kepala desa yang mencoba mengabaikan tugas sosial tersebut. Kepala desa hanya mau datang kepada pendukung ketika pilkades sebagai bentuk balas budi. Dan sebaliknya, kepala desa tidak mau datang kepada penduduk yang bukan pendukung. Kepala desa kurang menyadari bahwa beliau adalah seorang kepala desa yang harusnya melayani semua warga di wilayah desa. Semua penduduk membutuhkan pelayan sosial dari kepala desa, tidak pandang bulu apakah dulu mendukung atau tidak,

---

<sup>16</sup> Tugas sosial ini merupakan akibat dari hubungan patronase antara kepala desa dengan rakyat. Kepala desa menempati patronat yang wajib memberi kebutuhan rakyat sebagai client. Rakyat sebagai client telah memberi dukungan politik sebagaimana yang dibutuhkan client.



kaya atau miskin. Kepala desa Pak Fahruri, dinilai oleh masyarakat, hanya cenderung mendatangi kepada pendukungnya dan penduduk Tugu karena basis pemilih dari desa ini. Pak Fahruri cenderung mengesampingkan warga lainnya. Kondisi ini mudah menjadi pemicu masalah hubungan antara rakyat dengan kepala desanya. Padahal, di mata pendukungnya, Pak Fahruri dinilai sebagai kepala desa yang sangat baik. Demikian juga kepala desa Pak Wahyu, di mata pendukungnya, Pak Wahyu merupakan salah satu kepala desa yang paling hebat, berwibawa, berkesan di masyarakat, ditaati, dan sebagainya. Tetapi, Pak Wahyu di mata lawan politiknya merupakan kepala desa yang sangat tidak baik kepada rakyatnya. Akhirnya, kedua kepala desa tersebut berakhir di tengah jalan – tidak sampai selesai menjalankan tugasnya karena dimundurkan oleh rakyatnya sendiri.<sup>17</sup>

Kepala desa tidak bisa cuek dengan tugas sosial. Kepala desa harus wajib menjalankan tugas sosial meskipun tidak diatur dalam undang-undang. Kepala desa diwajibkan bukan hanya memberikan kontribusi berupa *'sembuh'* – nasehat, tetapi juga *'turut'* – bantuan materi kepada warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, menjadi kepala desa dengan tujuan mendapatkan ekonomi itu pepesan kosong. Sebagian besar menjadi kepala desa itu justru uangnya habis untuk menunaikan tugas sosial.

#### D. EKONOMI POLITIK KEPALA DESA

Di Kalipanjang, kepala desa itu sangat dihormati orang. Mereka merupakan *the ruling elite* di desa tersebut.<sup>18</sup> Seseorang yang masuk dalam jajaran kepala desa menempati kelas priyayi di desa tersebut. Bahkan kekuasaan kepala desa sebelum era reformasi sering disebut dengan raja kecil,<sup>19</sup> karena sangat berkuasa dalam banyak hal. Ketika di tengah masyarakat selalu mendapatkan tempat khusus. Apa yang diperintahkan kepala desa tidak ada yang membantahnya. Pada era Orde Baru, kepala desa pada umumnya sangat ditakuti oleh warganya. Bahkan penghormatan itu tidak hanya berhenti pada waktu menjabat, tetapi masih tetap dilakukan

---

<sup>17</sup> Pak Wahyu diturunkan oleh warganya melalui tangan DPRRI tahun 1979, dan Pak Fahruri diturunkan warga melalui kekuasaan Bupati tahun 2005.

<sup>18</sup> Gaetano Mosca, *The Ruling Class. Elementi de Scienza Politica*. New York: McGraw-Hill 1939, hal. 50

<sup>19</sup> Jean-Luc Maurel, 'Pamong Desa atau Raja Desa?' Dalam Frans Antlov dan Sven Cederroth. *Kepemimpinan Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 159

setelah lengser dari jabatannya dengan memberi panggilan 'pak mantan'.

Kepala desa pasti mendapatkan kesempatan untuk berpidato, memberikan sambutan, memberikan sembur kepada masyarakat, mendapatkan tempat terhormat dan sebagainya. Orang desa menyatakan kepala desa itu '*kalah beruk, menang celuk*'<sup>20</sup> (imbalan uangnya kecil, tetapi banyak memperoleh panggilan, kewibawaan). Celuk atau panggilan inilah yang menggoda para calon kepala desa sehingga rela mengeluarkan uang yang besar. Celuk atau panggilan ini dalam istilah sosiologi Pierre Bourdieu disebut dengan *cultural capital*.<sup>21</sup>

Kepala desa memiliki kekuasaan yang besar atas warganya. Salah satu instrumennya adalah pengurusan surat, baik surat keterangan berkelakuan baik, surat perijinan, surat keterangan kependudukan. Surat keterangan berkelakuan baik sangat penting dalam pengurusan surat berkelakuan baik yang sangat diperlukan untuk mencari pekerjaan, dan melanjutkan sekolah. Kedua hal tersebut sangat penting menentukan kesejahteraan seseorang. Semua surat yang diperlukan warga memerlukan tanda tangan kepala desa. Surat tersebut di antaranya kelahiran, pernikahan, kematian, surat kartu keluarga, kependudukan, berkelakuan baik, dan segala macam surat keterangan. Penandatanganan surat-surat tersebut kekuasaan kepala desa sangat besar. Tanpa tanda tangan kepala desa, maka warga kesulitan untuk mendapatkan berbagai surat tersebut.

Oleh karena itu, kepala desa Pak Wahyu mampu mempertahankan kedudukannya sebagai carik dan kepala desa dalam waktu yang lama karena beliau memiliki kekuasaan yang besar. Beliau pada waktu itu mempersulit penduduk mereka yang afiliasi politiknya berbeda. Di antara surat yang paling menjadi masalah adalah surat keterangan berkelakuan baik, karena jika tidak mendapatkan surat keterangan ini penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan, melanjutkan sekolah dan sebagainya. Maka di era kepemimpinan Pak Wahyu penduduk sedikit yang mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri, melanjutkan sekolah, dan mendapatkan pekerjaan sektor formal, karena kesulitan mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Istilah tersebut berkembang di daerah Pematang dan sekitarnya

<sup>21</sup> Richard Jenkins, 2002. *Pierre Bourdieu*. London: Routledge, hal. 84

<sup>22</sup> Nico Schulte Nordholt, *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 308-309

Namun demikian, zaman telah mengalami perubahan besar di era reformasi seperti sekarang ini. *Political power* dari kepala desa sangat terbatas karena kontrol dari masyarakat, BPD, dan sebagainya. Kepala desa tidak bisa adigang adigung, sok kuasa kepada rakyatnya.<sup>23</sup> Kepala desa pada saat ini dengan mudah bisa digulingkan oleh rakyatnya jika menyakiti hati rakyat, seperti yang terjadi di Purworejo, Blambangan dan sebagainya. Kepala desa tidak bisa seperti raja kecil yang memiliki kekuasaan besar.

Pada waktu dulu, kepala desa juga beberapa sumber ekonomi. *Pertama*, kepala desa Kalipanjang tidak mendapatkan gaji dari negara, tetapi dibayar tanah bengkok (tanah kas desa), sebesar 5 Ha, sementara perangkat yang lain hanya 1 Ha. Bengkok 5 Ha itu menjadi berkurang jika kepala desa menjanjikan tanah bengkoknya dikelola oleh masjid, ketua tim sukses atau lainnya. Hasil panen dari bengkok tersebut tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa. Oleh karena itu, dalam prakteknya, kepala desa banyak yang menyewakan tanah bengkoknya secara tahunan. Maka tidak sedikit kemudian kepala desa tidak memiliki penghasilan dari tanah bengkok.

*Kedua*, uang surat-surat. Setiap penduduk yang mengurus surat keterangan dikenakan uang kas yang tidak ada ketentuan besarnya. Surat keterangan tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari kependudukan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Pada waktu kepala desa Pak Wahyu dan sebelumnya, uang kas tersebut jumlahnya sangat besar, karena orang sangat takut dengan kepala desa. Kemana pun kepala desa itu pergi selalu membawa stempel. Tetapi setelah era Pak Wahyu, tidak semua orang mau mengisi kas yang telah disediakan. Jika ada yang mengisi jumlahnya tidak besar seperti jaman dulu. Seiring dengan ketatnya pengawasan kepada pungutan, maka uang surat relative kecil, dan kepala desa tidak berani mengambil resiko melakukan pungutan terhadap uang surat karena sudah disediakan oleh pihak kabupaten.

*Ketiga*, uang perijinan keramaian. Warga yang menyelenggarakan hajatan biasanya menyewa soundsystem, atau pertunjukkan musik dan sebagainya. Orang yang mempunyai hajatan juga masih membayar ijin keramaian kepada kepala desa. Keramaian itu memerlukan keamanan,

---

<sup>23</sup> Pada awal reformasi, ratusan kepala desa di Jawa Tengah dilengserkan oleh rakyatnya karena dicurigai melakukan tindakan KKN, selingkuh, dan pelanggaran etika lainnya.

maka perlu dilindungi oleh penguasa desa. Pada waktu Pak Wahyu, peraturan uang perijinan ini sangat ketat. Tetapi sekarang ini, orang sangat cuek pada pajak perijinan keramaian. Masyarakat mau membayar kalau ada keamanan yang datang mengamankannya. Jika tidak ada aparat hansipnya, maka masyarakat tidak mau membayarnya.

*Keempat*, uang pologoro. Setiap ada transaksi jual beli warga yang menjual harus memberi uang pologoro kepada kepala desa. Jumlahnya ditentukan oleh kepala desa. Penduduk tidak tahu standardnya. Besarnya uang pologoro tergantung pada kemauan kepala desa. Jika nilai transaksinya besar, maka kepala desa menetapkan jumlah uang yang besar. Demikian juga sebaliknya. Kepala desa juga selalu mengikuti proses sertifikasi tanah. Salah satu tugas kepala desa itu dibidang tanah, maka setiap kepala desa memegang buku induk tanah. Oleh karena itu jual beli tanah, sertifikasi tanah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tanah tidak bisa menghindar dari kepala desa. Namun demikian, saat ini transaksi jual beli tanah banyak yang tidak melalui desa. Mereka juga tidak mau melapor ke desa, karena khawatir dikenakan ketentuan pologoro. Masyarakat lebih memilih memakai notaris agar tidak banyak urusan.

*Kelima*, uang jasa pajak. Kepala desa akan mendapatkan *fee* dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Tidak semua pajak disetorkan kepada negara, tetapi ada bagian untuk pengumpulan pajak. Besarnya sudah ditentukan sesuai aturan. Hal ini sampai sekarang masih berlangsung meskipun jumlahnya semakin kecil. Kepala desa dianggap berhasil dan berhak mendapatkan bonus jika warganya sadar membayar pajak. Namun demikian, pembayaran pajak sekarang banyak dilakukan di bank, sehingga praktis mengurangi bonus kepala desa.

*Keenam*, tradisi untuk mengirim kepada pamong desa itu masih ada dengan istilah *nyorog*. Setiap warga melangsungkan hajatan seperti walimah, warga melakukan *nyorog*. Mereka yang mendapatkan kiriman berkat itu antara lain kepala desa, kadus, dan polisi desa. Kiriman dari mereka yang memiliki hajatan itu terdiri dari nasi lengkap dengan lauk-pauk, kue dan buah. Tradisi ini dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Bahkan di zaman Pak Wahyu dan sebelumnya *nyorog* itu untuk lima pamong yaitu kepala desa, carik, lebe, kadus dan polisi desa. *Nyorog* ini tidak ada aturan tertulisnya, tetapi tradisi yang sudah turun menurun, menjadi norma sosial, sehingga kalau tidak melakukan seakan menjadi tidak baik. Masyarakat menganggap

bahwa berlangsungnya acara walimah tersebut tidak lepas dari peran para pamong tersebut. Namun demikian, tradisi *nyorog* jauh berkurang – mereka melakukannya kalau memiliki hajatan yang relatif besar dan membutuhkan surat dari kepala desa.

Pada waktu kepala desa Pak Wahyu, beliau menerapkan program *jurungan* – rakyat mengolah tanah bengkok milik kepala desa tanpa dibayar. Rakyat tidak berani membantahnya. Perintah kepala desa wajib ditaati. Kepala desa Pak Wahyu dan sebelumnya juga menerapkan *jonggol* – memberikan sebagian panen kepada kepala desa. Hal tersebut sebenarnya warisan dari penjajah Belanda dan Jepang, tetapi diwarisi oleh kepala desa Kalipanjang hingga awal Orde Baru. Setelah Pak Wahyu lengser, sedikit demi sedikit, *jurungan* dan *jonggol* mulai menghilang.

Pada saat ini sumber ekonomi kepala desa sangat terbatas. Pendapatan yang diperoleh selama menjabat kepala desa tidak bisa menutup investasi yang telah dikeluarkan pada waktu pilkades. Biaya untuk mengolah tanah bengkok sudah sangat mahal, sehingga hal ini mengurangi keuntungan panen yang diperolehnya. Tidak semua warga mengirim *nyorog* seperti zaman dulu. Uang surat menyurat dipegang oleh sekretaris desa, sehingga kepala desa tidak mengurusnya, bahkan sebagian masyarakat tidak memberikan uang karena tidak ada ketentuan harus membayarnya. Bahkan di beberapa tempat, desa yang menarik uang surat menyurat bisa dilaporkan sebagai pidana. Tidak semua masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah melalui kantor kepala desa. Mereka lebih memilih notaris.

Oleh karena itu, kepala desa sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan ekonomi apa-apa, bahkan ekonomi yang diperolehnya tidak sebanding tugas sosial yang harus diembannya meskipun tidak ada ketentuan tertulis. Tingginya tuntutan dan kebutuhan hidup, maka tidak heran kalau kepala desa kemudian yang terjerat kasus korupsi – menggunakan dana pemerintah desa, pajak, bantuan, dan uang lainnya untuk keperluan pribadinya.

## E. KESIMPULAN

Membaca kegiatan pilkadesa di desa Kalipanjang menunjukkan bahwa pilkades merupakan kegiatan investasi mahal. Ratusan juta habis untuk kegiatan pilkades. Setelah menjabat, kepala desa harus menjalankan

tugas sosial yang tidak ringan – permintaan sumbangan kegiatan tidak pernah berhenti, undangan selalu menumpuk, dan kegiatan sosial yang memerlukan dana mengantri . Semua kegiatan itu membutuhkan uang karena masyarakat mengharapkan kepala desa bukan hanya memberi *sembur* (nasehat), tetapi juga *uwar* (materi). Padahal gaji dari kepala desa itu hanya bengkok, yang hasilnya tidak bisa menutup modal yang telah dikeluarkan, memenuhi kebutuhan pribadi dan tugas sosial. Kepala desa hanya mendapatkan *celuk* yang tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan hidup. Mereka hanya mendapatkan status sosial, penghormatan, prestise, dan *cultural capital* lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton E. Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2004
- Bambang Hidayana, Glembuk: Strategi Politik dalam Rekrutmen Elit Penguasa di Desa Puhungansari, Yogyakarta, dalam *Humaniora*, FTB UGM, Vol 23, No. 1 Tahun 2001, hal 1-15
- Dirk Berg-Schlosser, and Norbert Kersting *Poverty and Democracy*, London: Zed Books. 2003
- Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo, 1998
- Frans Lipset, "The Social Requisites of Democracy Revisited" dalam *American Sociological Review*, 59 (1): 1-22, 1994
- Gaetano Mosca. *The Ruling Class. Elementi de Scienza Politica*, New York: McGraw-Hill 1939,
- Hans Antlov, *Negara dalam Desa: Patronasi Kepemimpinan Lokal*, Yogyakarta: Lappera. 2002
- James C Scott, "Patron-Client Politic and Political Change in Southeast Asia" *American Political Science Review* 66 (1) 1972
- Jean-Luc Maurer, 'Patnong Desa atau Raja Desa?' dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth (penyunting) *Kepemimpinan Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001, hal.133-162
- Juliette Koning, *Generation of Change: Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village during the New Order*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Loïc Wacquant, "Towards a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu", *Sociological Theory*, vol. 7, 1989, hal. 33-41
- Nico L Kana, Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa, dalam *Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora* Tahun 1 no. 2. 2001
- Nico Schulte Nordholt, *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu*. London: Routledge. 2002.
- Sartono Kartodirjo, *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Aditya Media. 1992
- Suzanne Keller, *Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society*, New York: Random House, 1963.